



## BAB VI

# PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAH

*Bab ini memuat laporan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2013. Secara umum Bab ini terdiri dari kerjasama antar daerah, kerjasama dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal, pencegahan dan penanggulangan bencana, dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.*

Sebagai badan eksekutif daerah, dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki tugas umum penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan daerah tersebut didasarkan pada azas desentralisasi dan kewenangan otonom yang dimiliki, dimana secara teknis fungsional dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada baik oleh badan, dinas, kantor, bagian maupun unit kerja lainnya yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Secara operasional, tugas-tugas umum pemerintahan daerah dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, seperti kerjasama antar daerah, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal, pencegahan dan penanggulangan bencana, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

### A. KERJASAMA ANTAR DAERAH

Otonomi daerah yang digulirkan pemerintah dimaksudkan agar masing-masing daerah dapat leluasa dalam mengelola sumber daya yang ada dengan berbagai kewenangan yang telah diserahkan. Konsekuensi dari hal tersebut adalah daerah dituntut untuk menciptakan berbagai terobosan guna memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama antar daerah memungkinkan suatu daerah untuk memaksimalkan berbagai potensinya, baik potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia.

Globalisasi yang terjadi saat ini menyebabkan suatu daerah tidak dapat mengasingkan diri dan terlepas dari daerah yang lain. Suatu daerah dituntut untuk mengikuti perkembangan yang terjadi secara global baik perkembangan ilmu



pengetahuan, teknologi, maupun perkembangan di bidang-bidang yang lain. Guna mengantisipasi hal tersebut dan mempertahankan eksistensinya, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur perlu menjalin kerjasama dengan daerah-daerah lain maupun dengan pihak- pihak lainnya untuk mengikuti perkembangan-perkembangan tersebut. Dengan potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kerjasama antar daerah dimasa yang akan datang.

Beberapa kebijakan daerah telah ditetapkan sebagai upaya untuk memberikan arah dan landasan hukum dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dalam rangka mewujudkan keserasian/sinergitas hubungan antar dan inter lembaga pemerintahan daerah, terjalinnya hubungan kerjasama yang baik antar daerah, mantapnya koordinasi pemerintahan, terciptanya suasana yang kondusif, aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat, terbangunnya sistem informasi dan komunikasi daerah yang mudah, aktual dan terpercaya.

Kerjasama antar daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur antara lain dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Kerjasama ini berupa penentuan tapal batas sebagai dasar penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Adapun output dari kegiatan kerjasama ini ialah kesepakatan tapal batas Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Kabupaten tetangga.

## **B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA**

Kerjasama daerah dengan pihak ketiga juga merupakan salah satu upaya daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip yang dianut dalam pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga sama dengan prinsip yang dianut dalam kerjasama antar daerah, yaitu : efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah NKRI, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan dan kepastian hukum.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata cara Pelaksanaan Kerjasama daerah, menyatakan bahwa kerjasama daerah adalah kesepakatan antar gubernur atau gubernur dengan bupati/walikota atau antara bupati/walikota dengan bupati/walikota yang lain dan atau gubernur, bupati/walikota dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. Peraturan pemerintah tersebut juga menyebutkan bahwa pihak ketiga adalah



---

departemen/lembaga pemerintah non departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, badan hukum milik daerah, seperti yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

Adapun kerjasama yang dilakukan oleh Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan selama tahun 2013 yaitu :

#### **1. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi**

##### Universitas Jambi

Kerjasama dengan Universitas Jambi telah dilaksanakan sejak tahun 2005 melalui dokumen MoU Nomor 450/A/2005.151/J21/LL/2005 yang ditandatangani antara Bupati Tanjung Jabung Timur dan Rektor Universitas Jambi. Kerjasama dengan Universitas Jambi dibidang pendidikan diantaranya : pendidikan jalur khusus bagi putra-putri Tanjung Jabung Timur untuk mengikuti program Diploma-3 Akuntansi fakultas ekonomi, peserta program ini telah kembali menjalankan tugasnya di Tanjung Jabung Timur pada akhir tahun 2012 lalu. Dengan kembalinya bertugas setelah menyelesaikan study diharapkan dapat memberi kontribusi dalam bagi pemerintah daerah dalam usaha mencapai predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), selain peningkatan sumber daya aparatur.

Kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan juga dilakukan tahun 2010, pemerintah daerah memberi beasiswa kepada 40 orang putra-putri Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mengikuti pendidikan Diploma-3 Agribisnis Penyuluh Pertanian pada Fakultas Pertanian Universitas Jambi, direncanakan akan selesai pada medio tahun 2014. Penyelenggaraan pendidikan penyuluh pertanian ini merupakan salah satu usaha pemerintah daerah dalam peningkatan hasil panen dan peningkatan sumber daya manusia serta pemenuhan kebutuhan tenaga penyuluh.

Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Universitas Jambi juga dilakukan dalam penyusunan dokumen-dokumen penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang membutuhkan tenaga akademis sebagai narasumber.

##### Universitas Gadjah Mada

Kerjasama dengan Universitas ini telah berhasil mendidik sebanyak 25 orang putra Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Diploma-3 Kesehatan Hewan di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gajah Mada akhir tahun 2012 dan telah mulai melaksanakan tugasnya melayani masyarakat di sektor kesehatan hewan sebagai tenaga honorer. Penyelenggaraan pendidikan manteri hewan/Ahli madya kesehatan



hewan ini merupakan salah satu upaya Pemda Kabupaten menjadikan daerah ini sebagai sentra peternakan Jambi, melalui peningkatan hasil ternak, kesehatan ternak dan peningkatan serta pemenuhan kebutuhan tenaga mantri hewan.

Mulai tahun 2010 juga terdapat 9 orang putra Tanjung Jabung Timur yang mengikuti pendidikan di Universitas Gajah Mada dengan multi disiplin ilmu.

#### Universitas Batanghari Jambi

Kerjasama dengan Universitas Batanghari dibidang pendidikan, antara lain : pada tahun 2010 sebanyak 65 orang putra-putri Tanjung Jabung Timur mengikuti pendidikan untuk tiga jurusan yaitu jurusan teknik tangkap ikan, teknik sipil, dan teknik lingkungan. Hal serupa juga dilaksanakan pada tahun 2011 untuk 35 orang putra-putri Tanjung Jabung Timur.

Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Universitas Batanghari Jambi juga dilakukan dalam penyusunan dokumen-dokumen penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang membutuhkan tenaga akademis sebagai narasumber.

### **2. Kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI**

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka mencapai status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan daerah dan pencapaian pertanggungjawaban pada aspek manajerial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur membangun jaringan kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (BPKP-RI) yang tertuang dalam Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) Nomor 050/968/DATA/BAPPEDA dan Nomor PRJ-5118/PW05/2007.

### **3. Kerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan**

Kerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur membangun jaringan kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan RI (BPK-RI) yang tertuang dalam Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) Nomor 188/NK/X-XIII.2/11/2012 dan Nomor 180/04/HKM/2012.



---

#### **4. Kerjasama dengan Perusahaan Migas Petrochina Jabung Ltd.**

Dalam rangka mewujudkan kewajiban perusahaan berupa *Cooperate Social Responsibility* (CSR), Petrochina Jabung Ltd. tahun 2013 telah merealisasikan 14 program CSRnya dalam beberapa sektor pembangunan dengan anggaran sebesar Rp. 22.607.826.800,00 , diantaranya : Pembangunan Portal Jalan Kompleks Perkantoran, Penimbunan halaman sekolah SMA 5, Penimbunan halaman sekolah SD 23, Pembangunan Pustu di Rantau Karya, Bantuan Mesin Pertanian - Power Tresser, Pelatihan dan magang bidang Otomotif sebanyak 20 Partisipan, Lanjutan program bedah rumah sebanyak 50 rumah, Pembangunan ruas jalan simpang Pelabi – simpang IV Block D sepanjang 6,5 KM, Pembangunan jaringan listrik RT 2 dan RT 3, Desa Rantau Karya sepanjang 6,5 KM, Pembangunan Jalan penghubung dari pusat KTM Geragai - SK 7 Blok D sepanjang 3.5 KM, Pembangunan sekolah SD 169, Pembangunan puskesmas desa Pandan Lagan (Non Cost Recovery), Pembangunan Mesjid Nurul Falah (Non Cost Recovery), dan Pemberdayaan petani miskin melalui program peternakan.

#### **5. Kerjasama dengan Politeknik Kesehatan Departemen Kesehatan Jambi**

Kerjasama dengan Politeknik Kesehatan telah dimulai sejak tahun 2004, dan sampai saat ini telah meluluskan lebih dari 120 ahli madya kebidanan dan 80 ahli madya keperawatan. Penyelenggaraan pendidikan kebidanan ini merupakan salah satu usaha pemerintah daerah dalam upaya pemerataan penyebaran bidan sampai ke desa-desa sangat terpencil dan sangat-sangat terpencil, yang merupakan tenaga strategis untuk penurunan angka kematian ibu dan anak.

#### **6. Kerjasama dengan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk**

Kerjasama dengan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk dalam hal pembangunan dan pengembangan Teknologi Informasi (*e-government*) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui MoU No.050/393/Eko/Bappeda, dan No.HK.840/DES-U01/2008 pada tanggal 21 Oktober 2008. Sampai dengan tahun 2013 ini pengembangan sistem informasi berdasarkan teknologi informasi (*e-government*) sudah dapat diimplementasikan secara bertahap ditengah keterbatasan sumber daya tenaga yang ada di Kabupaten ini.

#### **7. Kerjasama dengan Bank 9 Jambi**

Salah satu bentuk kerjasama dengan Bank 9 Jambi pada tahun 2012 ialah penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp. 11.250.000.000,00 kepada PT. Bank Jambi. Kerjasama yang lain ialah penyaluran kredit modal kerja sebesar Rp.



---

7.900.000.000,00 yang tertuang dalam Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) Nomor Pemda : 500/2974/PEREKON/2012 dan Nomor Bank Jambi : 33.12/PKS.DIR/2012.

### **C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DAERAH**

Koordinasi utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama tahun 2013 adalah koordinasi institusional. Kegiatan koordinasi yang dilakukan mampu secara efektif mengkomunikasikan berbagai informasi dan masukan yang diperlukan oleh segenap penyelenggara pemerintahan, sehingga proses pelaksanaan tugas dan fungsi segenap aparatur penyelenggara negara dapat berjalan optimal melalui pengaturan bersama dan kesepakatan bersama.

Beberapa koordinasi utama yang dilaksanakan antara lain:

1. Koordinasi dengan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Koordinasi dengan unsur Forkompimda Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Koordinasi dengan aparat keamanan dan penegak hukum.
4. Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.
5. Koordinasi dengan perangkat pusat di daerah dan instansi vertikal lainnya seperti BPS Kabupaten, Balai Taman Nasional Berbak dan BPN Kabupaten.

Pelaksanaan koordinasi yang bersifat utama dan strategis dilakukan oleh Bupati Tanjung jabung Timur bersama-sama dengan unsur Forkompimda Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta perangkat daerah yang terkait. Bersama dengan para pimpinan wilayah, Bupati Tanjung Jabung Timur melakukan rapat-rapat atau menyelenggarakan Forum Musyawarah Pimpinan Daerah (Forkompimda), sedangkan dengan perangkat daerah dilakukan dalam bentuk rapat-rapat koordinasi yang sifatnya koordinasi teknis. Rapat atau forum koordinasi dimaksudkan dalam rangka konsultasi dan koordinasi untuk mewujudkan dan memelihara stabilitas juga situasi serta kondisi daerah yang kondusif.

Rapat Forkompimda yang dilakukan memiliki beberapa tujuan antara lain :

1. Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara berdaya guna dan berhasil guna.
2. Mengevaluasi dan melakukan penilaian atas intensitas, ekstensitas, situasi dan kondisi ketentraman, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat serta merumuskan langkah-langkah strategis, teknis dan taktis yang diperlukan dalam rangka



---

pengendalian, pencegahan maupun penanggulangan ketentraman dan ketertiban umum.

3. Menentukan sistem, prosedur dan mekanisme operasional pengamanan pelaksanaan kebijakan-kebijakan dan program pembangunan kota guna mewujudkan stabilitas nasional dan daerah yang mantap dan terkendali serta kondusif.

Selain koordinasi ke samping (horizontal) dan ke bawah, tugas umum pemerintahan yang bersifat koordinatif juga diselenggarakan secara vertikal, baik kepada instansi vertikal di tingkat provinsi maupun dengan berbagai kementerian teknis terkait.

Koordinasi dengan kementerian yang dilaksanakan sampai dengan tahun 2013 adalah dengan Kementerian Sosnakertrans melalui Program Pembangunan Infrastruktur Daerah (PDID) atau dikenal dengan KTM (Kota Terpadu Mandiri). PDID merupakan salah satu instrumen mempercepat pembangunan dan kemakmuran suatu daerah yang tertinggal. Instrumen ini menitikberatkan pada percepatan suatu daerah dengan mengintegrasikan beberapa sub kawasan dengan segala potensi dan peluang yang tersedia sehingga menjadikannya suatu kawasan pusat pertumbuhan dengan beberapa kota penyangga. Keterpaduan dan keselarasan yang dikembangkan diharapkan mampu meningkatkan gairah perekonomian daerah dan meningkatkan daya beli masyarakat hingga tercapai tingkat kesejahteraan dan kemandirian yang diinginkan

Di sektor pertanian, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan kerjasama dengan Kementerian Pertanian dalam pengembangan lahan suboptimal rawa pasang surut sebagai upaya tetap menjadikan daerah ini sebagai lumbung pangan Provinsi Jambi dan meningkatkan kesejahteraan kehidupan petani tanaman pangan.

Di sektor kehutanan, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga melaksanakan kerjasama dengan Balai Taman Nasional Berbak. Koordinasi diwujudkan dengan pembentukan forum ini harus dilakukan mengingat keberadaan Taman Nasional Berbak termasuk administratif sekaligus aset Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Secara keseluruhan, pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dalam bentuk koordinasi dilaksanakan dalam bentuk pelaporan, rapat-rapat dan forum koordinasi dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintah daerah. Hasil pokok yang dicapai selama tahun 2013 adalah meningkatnya manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota yang lebih efektif dan terpadu.



---

**D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA**

Sepanjang tahun 2013, kemarau panjang yang melanda hampir seluruh kawasan Indonesia tidak terkecuali kabupaten Tanjung Jabung Timur berpotensi menimbulkan bencana kebakaran. Kebakaran yang disebabkan kemarau ini lebih sering terjadi di kawasan hutan maupun perkebunan yang pada umumnya adalah lahan gambut. Penyebab kebakaran lain terjadi juga karena kelalaian manusia seperti pembukaan lahan dengan membakar dan instalasi yang kurang baik atau tidak sesuai dengan standar minimal yang telah ditentukan.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mempunyai potensi bencana alam antara lain : banjir, kebakaran, puting beliung, tanah longsor dan sambaran petir, pada tahun 2013 hanya mengalami tiga jenis bencana alam dari lima jenis potensi bencana alam di kabupaten ini. Bencana alam yang terjadi di tahun 2013 sebanyak 18 bencana yang terdiri dari bencana kebakaran sebanyak 14 kali, bencana banjir sebanyak 2 kali dan bencana tanah longsor sebanyak 2 kali.

**1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya**

Bencana yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2013 relatif kecil dan itupun lebih banyak diakibatkan karena kelalaian dari manusia dari pada faktor alam.

Kejadian/bencana kebakaran yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2013 :

- a. Bencana kebakaran di kelurahan Nipah Panjang II Kecamatan Nipah Panjang pada tanggal 10 Januari 2013 dengan kerugian bangunan yang rusak berat sebanyak 1 unit rumah warga atau sebesar Rp. 50.000.000,00.
- b. Bencana banjir di desa Rantau Makmur, desa Telago Limo, Desa Rawasari dan kelurahan Simpang Kecamatan Berbak pada tanggal 10 Januari 2013.
- c. Bencana kebakaran di kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi pada tanggal 11 Januari 2013 dengan kerugian bangunan yang rusak berat sebanyak 2 unit (1 unit kantor pos giro dan 1 unit warung) atau sebesar Rp. 11.525.000,00.
- d. Bencana kebakaran di kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara pada tanggal 2 Februari 2013 dengan kerugian bangunan yang rusak berat sebanyak 1 unit dermaga atau sebesar Rp. 11.000.000,00
- e. Bencana banjir di kelurahan Bandar Jaya, Desa Pematang Mayam, desa Marga Mulya Kecamatan Rantau Rasau pada tanggal 11 Februari 2013.



- 
- f. Bencana kebakaran di kelurahan Kampung Singkep Kecamatan Muara Sabak Timur pada tanggal 22 Februari 2013 dengan kerugian bangunan yang rusak berat sebanyak 1 unit rumah warga atau sebesar Rp. 150.000.000,00.
  - g. Bencana kebakaran di kelurahan Rantau Indah Kecamatan Dendang pada tanggal 25 Februari 2013 dengan kerugian bangunan yang rusak berat sebanyak 1 unit rumah warga atau sebesar Rp. 20.000.000,00.
  - h. Bencana kebakaran di desa Simpang Datuk Kecamatan Nipah Panjang pada tanggal 14 Maret 2013 dengan kerugian bangunan yang rusak berat sebanyak 2 unit dan rusak sedang sebanyak 2 unit atau sebesar Rp. 35.000.000,00.
  - i. Bencana tanah longsor di desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara pada tanggal 6 April 2013 dengan kerugian bangunan yang rusak berat sebanyak 2 unit dan rusak ringan sebanyak 3 unit atau sebesar Rp. 70.000.000,00.
  - j. Bencana kebakaran di kelurahan Sungai Lokan Kecamatan Sadu pada tanggal 26 Mei 2013 dengan kerugian bangunan yang rusak berat sebanyak 2 unit rumah warga.
  - k. Bencana tanah longsor di kelurahan Kuala Simbur Kecamatan Muara Sabak Timur pada tanggal 5 Juli 2013 dengan kerugian sebesar Rp. 57.000.000,00 (abrasi sungai Batang Hari).
  - l. Bencana kebakaran di Kecamatan Berbak pada tanggal 7 Juli 2013 dengan kerugian bangunan yang rusak berat sebanyak 1 unit rumah warga atau sebesar Rp, 21.500.000,00.
  - m. Bencana kebakaran di kelurahan Simpang Kecamatan Berbak pada tanggal 8 Agustus 2013 dengan kerugian bangunan yang rusak berat sebanyak 1 unit rumah warga atau sebesar Rp, 10.000.000,00.
  - n. Bencana kebakaran di desa Pemusiran Kecamatan Nipah Panjang pada tanggal 3 September 2013 dengan kerugian bangunan yang rusak berat sebanyak 6 unit, rusak sedang 2 unit dan rusak ringan 1 unit (rumah warga) atau sebesar Rp, 350.000.000,00.
  - o. Bencana kebakaran di kelurahan Simpang Kecamatan Berbak pada tanggal 22 September 2013 dengan kerugian bangunan yang rusak berat sebanyak 1 unit rumah warga atau sebesar Rp, 20.000.000,00.
  - p. Bencana kebakaran di desa Pandan Lagan Kecamatan Geragai pada tanggal 18 Oktober 2013 dengan kerugian bangunan yang rusak berat sebanyak 1 unit rumah warga dan rusak sedang 1 unit rumah warga atau sebesar Rp, 150.000.000,00.



- q. Bencana kebakaran di kelurahan Nipah Panjang II Kecamatan Nipah Panjang pada tanggal 5 Desember 2013 dengan kerugian bangunan yang rusak berat sebanyak 7 unit rumah warga dan rusak sedang 3 unit rumah warga atau sebesar Rp, 1.200.000.000,00.
- r. Bencana kebakaran di kelurahan Nipah Panjang II Kecamatan Nipah Panjang pada tanggal 25 Desember 2013 dengan kerugian bangunan yang rusak berat sebanyak 2 unit rumah warga dan rusak sedang 2 unit rumah warga.

## **2. Status Bencana**

Bencana alam yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah banjir, kebakaran, angin puting beliung dan tanah longsor dan masih berstatus bencana lokal.

## **3. Sumber dan Jumlah Anggaran**

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, baik bencana banjir, kebakaran, angin puting beliung dan tanah longsor, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan bencana yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

## **4. Antisipasi Daerah**

Antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana dilakukan dengan metode-metode preventif, seperti peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan terjadinya bencana, penyuluhan hukum tentang pentingnya memenuhi ketentuan-ketentuan perundang-undangan dalam pengelolaan ruang dan pemukiman, peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dan lain-lain.

Disamping itu penanganan terhadap kejadian bencana baik dari sebelum dan sesudah terjadinya bencana, sangat diperlukan adanya program serta koordinasi antar stake holder/instansi terkait dalam penanganan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah membuat program kegiatan antara lain:

- a. Pembentukan satgas penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi baik ditingkat desa/kelurahan dan kecamatan.
- b. Koordinasi dengan kecamatan untuk pembuatan posko-posko bencana
- c. Mengadakan pelatihan terhadap satgas PBP tentang penanggulangan bencana baik dari sebelum maupun sesudah terjadi bencana



- d. Penyebaran informasi serta himbauan kepada masyarakat akan gejala-gejala terjadi bencana dan agar selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap kejadian bencana
- e. Koordinasi antar stake holder/instansi terkait dalam penyamaan langkah dalam kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana
- f. Mengadakan sarana dan prasarana untuk evakuasi korban bencana alam.

Selanjutnya beberapa SKPD terkait telah pula mengantisipasi terhadap kemungkinan timbulnya bencana seperti : Dinas Sosnakertrans, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian dan Dinas Tata Kota.

#### **5. Satuan Kerja yang Menangani Bencana**

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bencana adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, namun disamping itu terdapat dinas /instansi yang juga terlibat atau mempunyai tugas dan fungsi dalam penanganan bencana antara lain :

- a. Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat
- b. Dinas Sosnakertrans Bidang pemberian bantuan (Bansos)
- c. Dinas Tata Kota pada bidang penanggulangan kebakaran
- d. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
- e. Pekerjaan Umum
- f. Dinas Kesehatan
- g. dan lain-lain

#### **6. Kelembagaan yang Khusus Dibentuk untuk Menangani Bencana**

Bahwa bencana dapat menghambat dan mengganggu baik kehidupan dan penghidupan masyarakat maupun pelaksanaan pembangunan dan hasilnya sehingga upaya penanggulangan bencana perlu dilakukan dengan tindakan yang terencana, terkoordinasi, terpadu, tepat dan cepat. Untuk itu diperlukan upaya nyata dalam rangka penanggulangannya dengan mengerahkan sumber daya yang ada dan dalam pelaksanaannya diperlukan satu wadah/lembaga tetap yang mengkoordinir seluruh rangkaian kegiatan tersebut.

Dalam hal ini pemerintah telah memberikan juklak dan juknis dalam penanganannya secara nasional dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Bakornas PBP), sedangkan di Provinsi



---

dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, di Kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh “Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Satlak PBP) yang posko sekretariatnya berada di Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saat ini sedang diproses pembentukan SKPD Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten yang digabungkan dengan Badan Kesbanglinmas.

#### **E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

Ketentraman dan ketertiban umum dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan terhadap aparat trantib guna mewujudkan hubungan koordinasi yang baik serta meningkatnya kemampuan dan kesiapan aparat dalam penanganan berbagai permasalahan hukum dan trantib, pengamanan aset-aset daerah serta penegakan Peraturan Daerah.